

**KAJIAN MEMBANGUN
KERJA SAMA SELATAN-SELATAN
INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN**

**Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Bidang Interregional
2011**

MEMBANGUN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan langkah nyata untuk mewujudkan solidaritas dan penguatan *collective action* di antara negara-negara berkembang yang terus mengalami transformasi dan penguatan melalui beberapa tahapan hasil pertemuan penting seperti Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Gerakan Non Blok tahun 1961, Kelompok-77 tahun 1964, Kelompok 15 tahun 1989, Kelompok D-8 tahun 1997, South Summit di Kuba dan Qatar tahun 2000 dan 2005, Resolusi PBB No. 58/220 tentang pembentukan *High Level Committee on South-South Cooperation* dan *Bogota Statement: Towards Effective and Inclusive Development Partnerships* tahun 2010.

Berbagai forum dan kesepakatan internasional di atas memperlihatkan bahwa KSS mempunyai sejarah yang panjang sebagai sebuah upaya untuk mengartikulasikan solidaritas dan perjuangan bersama secara terus menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan. Pengembangan KSS sangat penting dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global yang semakin dinamis antara lain:

- Krisis ekonomi dan keuangan global, serta harga sumberdaya energi yang makin tinggi dan fluktuatif. Sebagai contoh krisis yang terjadi pada 2008 telah berdampak sangat luas dalam perubahan tatanan ekonomi dunia;
- Semakin meluasnya krisis pangan dan kemiskinan akibat semakin besarnya ketimpangan;
- Perubahan iklim, berkurangnya daya dukung lingkungan, terjadinya bencana alam yang masif, serta merebaknya penyakit menular dan tidak-menular yang berdampak secara lintas negara; dan
- Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Indonesia untuk turut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini menjadi landasan dalam pelaksanaan hubungan internasional Indonesia dan hubungan antar negara. Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan adalah salah satu upaya dalam melaksanakan amanat ini.

Kebijakan KSS telah tercantum dalam Jakarta Commitment 2009, RPJPN 2005-2025, dan RPJM 2010-2014. Seminar Nasional telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010 yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan KSS Indonesia berdasarkan SK Menteri PPN pada Mei 2011. Tim bertugas antara lain mengembangkan Grand Design KSS 2011-2025 dan Blue Print KSS 2011-2014.

- **Grand Design** merupakan arah kebijakan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan secara umum dalam jangka waktu 2011-2025 sesuai dengan RPJPN 2005-2025 yang dibagi dalam tiga periode waktu:
 - Periode I : 2011 – 2014
 - Periode II : 2015 – 2020
 - Periode III : 2021 – 2025
- **Blue Print** (Periode I) merupakan kerangka kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dalam kurun waktu 2011-2014 sesuai dengan RPJMN 2010 - 2014

II. Modal Dasar, dan Tantangan dalam pelaksanaan KSS Indonesia

Indonesia memiliki modal dasar untuk berperan aktif dalam KSS, sebagaimana Politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif merupakan modal dasar bagi

Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional dan telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan berbagai negara.

Perubahan paradigma sebagai negara MIC untuk memberikan dukungan dan kontribusi bagi negara lain. Beberapa kegiatan telah dilakukan dan mendapat apresiasi internasional seperti : program training inseminasi buatan, training keluarga berencana, pengiriman tenaga ahli dan bantuan peralatan pertanian ke afrika, workshop disaster management, community empowerment program (PNPM), dan sebagainya.

Pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan di berbagai bidang telah diakui oleh dunia internasional, seperti bidang pertanian yang sangat penting dalam menanggulangi kerawanan pangan, kependudukan, penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan *community based development driven*, penanganan bencana alam, dan praktik-praktik konsolidasi demokrasi.

Modal dasar lain dalam KSS adalah pengalaman panjang Indonesia menyelenggarakan program Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) yang telah berlangsung sejak tahun 1982 yang melibatkan berbagai instansi yaitu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.

Ada tiga permasalahan yang masih di hadapi KSS Indonesia: (i) belum adanya desain nasional KSS; (ii) Indonesia belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS; dan (iii) belum teridentifikasinya keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia. Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Strategi dan kebijakan KSS Indonesia cenderung masih bersifat *ad hoc*, terfragmentasi (*fragmented points of delivery*) baik dalam penganggaran, perencanaan, koodinasi, maupun monitoring dan evaluasi serta masih kurang selaras dengan RPJPN dan RPJMN;
- Belum adanya kelembagaan yang secara khusus menangani KSS serta belum tercantumnya KSS secara spesifik dalam perundangan dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan KSS Indonesia mengakibatkan mekanisme dan prosedur KSS secara teknis belum tersusun dengan baik;
- Belum ada pengalokasian secara terintegrasi dari APBN untuk membiayai kegiatan KSS, sedangkan pembiayaan kegiatan yang selama ini berasal dari mitra kerja sama internasional akan mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya bantuan luar negeri dari negara donor dan mitra kerja sama internasional; dan
- Belum adanya sistem informasi serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.

III. Tujuan Visi Misi dan Kerangka Waktu

Grand Design Kerja sama Selatan-Selatan Indonesia bertujuan untuk meletakkan landasan bagi penguatan dan peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan yang lebih maju dan terintegrasi sesuai dengan dinamika konstelasi global untuk mendukung pemenuhan kepentingan dan pembangunan nasional. *Grand Design* KSS Indonesia akan menjadi acuan bagi penyusunan peta perjalanan KSS Indonesia selama periode 2011-2025 secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui *Grand Design* ini diharapkan peningkatan peran Indonesia di arena internasional dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan bagi pertukaran pengalaman dalam kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan.

- **Visi** pelaksanaan KSS Indonesia adalah “Kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan” (*Better Partnership for Prosperity*).

- **Tujuan** pelaksanaan KSS Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian bersama (*collective self reliance*) atas dasar solidaritas *mutual opportunity* dan *benefit*.
- **Misi** pelaksanaan KSS Indonesia antara lain:
 - Memajukan peran Indonesia dalam KSS sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional;
 - Mengembangkan kerjasama ekonomi antara negara-negara selatan dengan memainkan peran sentral sebagai *new emerging economy*, dan memadukannya dengan penguatan kerjasama teknik, politik, sosial dan budaya, serta iptek;
 - Memperkuat kerjasama pembangunan yang lebih inovatif dan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan;
 - Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama negara-negara selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional masing-masing negara untuk kepentingan bersama; dan
 - Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka hubungan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral yang lebih luas di berbagai bidang.

Kerangka waktu *Grand Design* KSS Indonesia di selaraskan dengan periode masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dengan pentahapan lima tahunan agar arah, tujuan dan sasaran KSS Indonesia dapat tercapai dengan baik. *Grand Design* KSS akan dijabarkan lebih rinci ke dalam *Blue Print* yang melingkupi tiga tahapan, sebagai berikut:

- Periode I: 2011-2014. Pada tahapan ini, kebijakan pengembangan KSS akan difokuskan pada penguatan konsolidasi berupa perumusan kerangka hukum, penguatan kelembagaan, pendanaan, sistem informasi serta promosi dan publikasi.
- Periode II: 2015-2019. Pada tahapan ini, prioritas akan difokuskan pada penguatan dan perluasan KSS Indonesia yang meliputi kelembagaan, penguatan dan perluasan kerjasama, pengembangan program baru, pengembangan dan pelibatan yang lebih luas, peningkatan dan perluasan jangkauan, serta evaluasi.
- Periode III: 2020-2025. Pada tahapan ini, pengembangan KSS akan difokuskan kepada peningkatan dan perluasan kerjasama, pengembangan program baru, peningkatan keterlibatan lembaga non pemerintah, peningkatan dan perluasan jangkauan, dan evaluasi.

IV. Kemitraan dan Pendanaan

KSS Indonesia akan dilaksanakan secara inklusif. Dalam hal ini peran pihak lain selain pemerintah pusat, yaitu: pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi. Mengingat keterbatasan sumber pendanaan dalam negeri, pembiayaan KSS akan dilaksanakan melalui paduan antara sumber APBN, pendanaan swasta, kerja sama bilateral dan multilateral, serta dana perwalian (*trust fund*). Pemilihan sumber pendanaan akan disesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang akan dilaksanakan.

Keinginan negara berkembang untuk mencari skema pembiayaan bagi program KSS yang inovatif telah mendorong semakin perlunya pembiayaan melalui skema "*triangular cooperation*". *Triangular cooperation* menjadi *modality* kerja sama yang strategis kedepan untuk mengakomodasikan peningkatan negara yang sudah berperan ganda, sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan.

Swasta juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan KSS Indonesia dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk kegiatan seperti

program pelatihan dan magang. Skema kontribusi melalui CSR dapat dikaitkan dengan kerja sama perdagangan dan investasi yang telah disepakati.

Perbankan dan lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendukung pembiayaan pihak swasta yang akan diversifikasi produk, dan perluasan pasar yang dilakukan melalui KSS.

Dukungan pembiayaan dari Mitra pembangunan namun tetap memperhatikan sovereignty Indonesia.

V. Dinamika Hubungan dan Lingkungan Strategis Kerja Sama Selatan-Selatan

Pelaksanaan program KSS dilakukan sesuai dengan potensi, pengalaman, keahlian serta modal dasar yang telah dimiliki oleh Indonesia dan didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan KSS. Penguatan dan perluasan program KSS tidak hanya dilaksanakan secara spesifik pada kawasan tertentu, melainkan secara fleksibel dan dinamis sesuai dengan potensi dan kesempatan yang tersedia untuk mengoptimalkan manfaat terutama bagi Indonesia. Perkembangan yang terjadi di berbagai kawasan dan konstelasi hubungan dan politik internasional yang semakin dinamis dan kompleks, mensyaratkan bahwa Indonesia perlu memetakan dan menata hubungan yang lebih erat dan timbal balik dengan negara-negara berkembang di berbagai kawasan dalam kerangka KSS.

Multilateral dan Global. Dinamika perekonomian global akan semakin dinamis di masa yang akan datang. Produk Domestik Bruto (PDB) Negara-negara berkembang secara agregat diprediksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara maju. Munculnya *new emerging economies* yang kuat seperti India, Cina, dan Korea yang juga memiliki fokus pengembangan di negara-negara selatan lainnya mendorong Indonesia menginisiasi hubungan kerjasama dalam lingkup KSS. Sepertinya pembentukan lembaga yang secara khusus menangani KSS telah ikut berperan memperkuat posisi Negara-negara tersebut dalam KSS.

Kawasan Regional di luar ASEAN. Komunitas regional dan sub-regional merupakan salah satu faktor pendorong bagi kemajuan KSS. KSS dapat dikembangkan melalui mekanisme kerjasama regional yang telah terbentuk, seperti *South west Pacific Dialogue (SwPD)*, *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*, *Mercado Común del Sur (MERCOSUR)*, dan *Pacific Islands Forum (PIF)*.

Kawasan Regional ASEAN. ASEAN merupakan lingkaran strategis pertama secara regional dalam KSS Indonesia. Terbentuknya komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN akan semakin mendorong kerjasama yang lebih kuat dalam rangka mencapai Komunitas ASEAN tahun 2015 yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kerja sama Bilateral Antar Negara Selatan. Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan melalui forum kerja sama bilateral dalam bentuk *joint commission*, *strategic partnership*, dan perjanjian bilateral lainnya. Kerja sama bilateral dinilai telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan volume pelaksanaan KSS. Hasil Kajian Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia Selengkapannya dapat diunduh pada kaitan berikut ini:

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPA	: <i>Buenos Aires Plan of Action</i>
COMESA	: <i>Common Market for Eastern and Southern Africa</i>
CPA	: <i>Caracas Program of Action</i>
DAC-OECD	: <i>Development Assistance Committee – Organisation for EconoMIC Cooperation and Development</i>
EAC	: <i>East African Community</i>
FEALAC	: <i>Forum for East Asia-Latin America Cooperation</i>
FOCAC	: <i>Forum on China-Africa Cooperation</i>
GNB	: Gerakan Non Blok
GSTP	: <i>Global System of Trade Preferences</i>
IBSA	: India, Brazil and South Africa
IOC	: <i>Indian Ocean Commission</i>
IOR-ARC	: <i>Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation</i>
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KSS	: Kerja sama Selatan-Selatan
LIC	: <i>Low Income Country</i>
MDF	: <i>Multi Donor Fund</i>
MERCOSUR	: <i>Mercado Común del Sur</i>
MIC	: <i>Middle Income Country</i>
MPPPEI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NAASP	: <i>New Asia Africa Strategic Partnership</i>
NAM-CSSTC	: <i>Non Aligned Movement-Center for South-South Technical Cooperation</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OKI	: Organisasi Kerja sama Islam
PIF	: <i>Pacific Island Forum</i>
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAARC	: <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
SADC	: <i>Southern African Development Community</i>
SwPD	: <i>South west Pacific Dialogue</i>
TICAD	: <i>Tokyo International Conference on African Development</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>

MEMBANGUN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN

I. PENDAHULUAN

Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan langkah nyata dalam mewujudkan semangat solidaritas dan penguatan *collective action* di antara negara-negara berkembang yang terus mengalami transformasi dan penguatan dengan tahap-tahap penting dari beberapa kerja sama sebagai berikut:

- Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955. Konferensi ini menjadi titik awal dari pergerakan politik bersama dunia ketiga untuk melakukan kerja sama internasional. Dalam konferensi tersebut, negara-negara peserta sepakat untuk menyediakan bantuan teknik satu sama lain;
- Deklarasi Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1961. Gerakan ini mendapatkan dukungan sangat besar yaitu sekitar dua per tiga dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau sekitar 55 persen penduduk dunia;
- *South Summit* pertama di Havana-Kuba, tahun 2000 yang dilanjutkan dengan *South Summit* kedua tahun 2005 di Doha-Qatar, dan *Marrakech Declaration on South-South Cooperation* tahun 2003 serta *UN Conference on South-South Cooperation* di Nairobi-Kenya, tahun 2009;
- Resolusi PBB No. 58/220 tentang pembentukan *High Level Committee on South-South Cooperation* dan penetapan tanggal 19 Desember sebagai “Hari PBB untuk Kerja sama Selatan-Selatan” memperkuat pandangan mengenai pentingnya kerja sama pembangunan di antara negara-negara Selatan.
- *Bogota Statement: Towards Effective and Inclusive Development Partnerships*, 25 Maret 2010. *Bogota Statement* menggarisbawahi beberapa hal penting yaitu: i) penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan menjadi kunci sukses KSS, ii) kerja sama harus dilandasi kepercayaan, percaya diri, dan sikap saling menghormati, iii) fleksibel untuk dapat diadopsi secara luas, dan iv) pentingnya berbagi pengalaman dan pembelajaran antar praktisi KSS dalam rangka meningkatkan kapasitas pembangunan.

Berbagai forum dan kesepakatan internasional di atas memperlihatkan bahwa KSS memiliki sejarah panjang untuk mengartikulasikan solidaritas dan perjuangan bersama secara terus menerus sebagai upaya mencapai kondisi yang lebih baik dilandasi dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan.

Pengembangan KSS menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan kondisi global yang semakin dinamis diantaranya:

- Realisasi kontribusi ODA negara-negara maju pada negara berkembang yang masih rendah dan belum mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam *Monterrey Consensus* tahun 2002, yaitu sebesar 0,7 persen dari PDB;

- Krisis ekonomi dan keuangan global, serta harga sumberdaya energi yang fluktuatif dan semakin tinggi. Krisis yang terjadi tahun 2008 berdampak sangat luas dalam perubahan tatanan ekonomi dunia;
- Semakin meluasnya krisis pangan dan kemiskinan akibat semakin besarnya ketimpangan;
- Perubahan iklim, berkurangnya daya dukung lingkungan, terjadinya bencana alam yang masif, serta merebaknya penyakit menular dan tidak-menular yang berdampak secara lintas negara; dan
- Ancaman keamanan lintas negara yang masih harus diwaspadai;

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan perubahan yang sangat mendasar bagi pelaksanaan pembangunan di negara berkembang. Masyarakat semakin rentan terkena pengaruh fenomena yang menglobal tersebut dimana penanganannya hanya dapat dilakukan secara efektif melalui upaya bersama, sistematis, dan berkesinambungan.

Dengan adanya perubahan konstelasi global, KSS menjadi salah satu pendorong bagi negara-negara berkembang untuk dapat semakin berperan dalam perekonomian dan kerja sama pembangunan. Perubahan ini antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di *new emerging countries*, seperti Cina, India, Brasil dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sedangkan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju melambat. Tidak hanya itu, di negara maju juga terjadi peningkatan angka pengangguran dan *aging population*. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan saling ketergantungan antara *advanced economies* dan *emerging economies*.

Kondisi-kondisi tersebut semakin mendorong KSS agar bertransformasi dan tidak hanya fokus pada kerja sama teknik, melainkan harus diperluas agar dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara berkembang yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kerja sama ekonomi menjadi prioritas utama sebagai faktor pendorong perekonomian dan pencapaian pembangunan. Disamping itu, penguatan juga harus terus dilakukan pada kerja sama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses transformasi dan reformulasi KSS dilakukan seiring dengan peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang menjadi "*middle income countries*". Posisi ini memungkinkan negara-negara berkembang seperti Brazil, Thailand, Malaysia dan Afrika Selatan untuk muncul sebagai "*new emerging donors*".

Dalam arsitektur kerja sama internasional, pelaksanaan KSS tidak terlepas dari semangat Deklarasi Paris tahun 2005 mengenai *Aid Effectiveness*. Melalui KSS bantuan luar negeri diharapkan dapat dikelola secara lebih efisien dan berkeadilan. Negara-negara selatan dapat saling berbagi mengenai praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam hal pengelolaan bantuan luar negeri di setiap negara. KSS juga dapat memfasilitasi dan memperkuat skema *triangular cooperation* atas dasar kesetaraan serta *mutual opportunity and benefit*. Dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Paris, Indonesia dan Lembaga/Negara mitra kerja sama pembangunan telah menandatangani *Jakarta Commitment* pada awal 2009 yang menjadi salah satu landasan pengembangan KSS Indonesia.

Bagi Indonesia, pengembangan KSS semakin penting dengan meningkatnya status Indonesia menjadi negara dengan penghasilan menengah (*middle income country*) dan salah satu anggota G-20. Keanggotaan Indonesia dalam G-20 memungkinkan untuk menyuarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang. Peran ini semakin meningkat seiring dengan prediksi bahwa kekuatan ekonomi Indonesia akan menempati posisi dua belas besar pada tahun 2025, dan tujuh besar pada tahun 2045.

KSS menjadi wahana yang sangat strategis untuk dapat berperan ganda, sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan. Secara bertahap hal ini menjadi modal bagi terbangunnya arsitektur kerja sama pembangunan internasional yang lebih berkeadilan. Pentingnya kemitraan antara negara maju dengan aktor lain dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan menjadi perhatian *Development Assistance Committee (DAC)* – *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan skema *triangular cooperation* dalam kerangka pelaksanaan peran ganda dan realisasi perubahan paradigma dari *donorship* kepada *partnership* secara bertahap sebagaimana semangat *Jakarta Commitment*.

Tujuan pelaksanaan KSS Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian bersama (*collective self reliance*) atas dasar solidaritas, *mutual opportunity* dan *mutual benefit*.

KSS Indonesia memiliki visi dan misi. Visi pelaksanaan KSS Indonesia adalah “Kemitraan yang lebih baik untuk *kesejahteraan (Better Partnership for Prosperity)*”. Adapun Misi pelaksanaan KSS Indonesia adalah:

- Memajukan peran Indonesia dalam KSS sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional;
- Mengembangkan kerja sama ekonomi antara negara-negara selatan dengan memainkan peran sentral sebagai *new emerging economy*, dan memadukannya dengan penguatan kerja sama teknik, politik, sosial dan budaya, serta iptek;
- Memperkuat kerja sama pembangunan yang lebih inovatif dan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan;
- Meningkatkan solidaritas dan kemandirian bersama negara-negara selatan melalui kemitraan dengan memanfaatkan potensi nasional masing-masing negara untuk kepentingan bersama; dan
- Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam rangka hubungan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang lebih luas di berbagai bidang.

Karakteristik Kerja sama Selatan-Selatan Indonesia. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari KSS Indonesia adalah yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Mempertahankan nilai positif Indonesia sebagai pelopor KSS dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- Kerja sama yang dilakukan diarahkan untuk dapat menguntungkan secara ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan baik di Indonesia maupun di negara penerima, termasuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan gender.

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSS dimaksudkan untuk pelaksanaan KSS Indonesia dengan luar negeri:

- *Mutual respect*. Saling menghormati kedaulatan nasional serta tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
- *Demand driven*. Berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan, dan permintaan dari masing-masing negara.
- *Non-conditionality*. Kemitraan inklusif dan tidak-bersyarat.
- *Equality, mutual respect, mutual benefit and opportunity*. Kesetaraan dan kesempatan yang sama.
- *Comparative advantage*. Pelaksanaan KSS didasarkan pada keunggulan komparatif di masing-masing Negara dan meningkatkan sinergi guna memperbesar manfaat yang diterima bersama.
- *Sustainability and independency*. Berkelanjutan namun tidak menciptakan saling ketergantungan.
- *Experience and knowledge sharing*. Dilaksanakan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Adapun prinsip untuk memantapkan pelaksanaan KSS Indonesia di dalam negeri adalah sebagai berikut:

- Inklusif. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan upaya bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk swasta, perguruan tinggi dan masyarakat.
- *Alignment*, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan menjadi hal utama agar KSS dapat menjadi faktor pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- Komprehensif dan berkesinambungan. Pelaksanaan KSS tidak dilakukan secara parsial dan terjebak pada sektor tertentu namun terintegrasi dan berkesinambungan.
- Transparansi dan akuntabilitas. KSS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- Fleksibel. Pengembangan KSS tidak dilaksanakan secara kaku baik dalam hal substansi, lokasi, maupun modalitas yang dipergunakan, melainkan dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan peluang dan perkembangan kondisi nasional dan internasional.

II. LANDASAN PELAKSANAAN KSS INDONESIA

Landasan pelaksanaan KSS Indonesia diletakkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kerja sama internasional Indonesia dan hubungan antar negara. Pengembangan Kerja sama Selatan-Selatan Indonesia merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan amanat ini.

Selain itu, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang mempunyai misi untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing dan berperan penting dalam pergaulan internasional yang dapat diupayakan melalui KSS.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah meletakkan KSS sebagai salah satu fokus pembangunan politik luar negeri dan wahana untuk peningkatan kerja sama ekonomi.

Begitu juga *Jakarta Commitment on Aid for Development Effectiveness* yang ditandatangani pada awal 2009 menjadi dasar kesepakatan bersama antara Pemerintah

Indonesia dan mitra kerja sama pembangunan untuk terus mengembangkan KSS untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inovatif.

Pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPPPEI) 2011-2025 telah menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 7 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini KSS memiliki peran penting sebagai bagian dalam kerangka desain MPPPEI dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan strategi utama yang terkait dengan pembangunan enam koridor ekonomi, penguatan sumber daya manusia dan iptek. Berkaitan dengan pelaksanaan KSS, peraturan perundangan yang pada saat ini dapat menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- c. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

III. DINAMIKA KERJA SAMA SELATAN-SELATAN SAAT INI

a. Dinamika Kerja sama Multilateral dan Global

Dinamika perekonomian global akan semakin dinamis di masa yang akan datang. Produk Domestik Bruto (PDB) Negara-negara berkembang secara agregat diprediksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara maju.

“*South Summit*” pertama di Havana-Kuba, tahun 2000 merupakan tonggak baru dalam penguatan dan peningkatan KSS. *High Level Conference on South-South Cooperation* tahun 2003 dan *South Summit* kedua tahun 2005 di Doha-Qatar, semakin memperkuat peranan dan kedudukan KSS dalam kerangka kerja sama pembangunan di antara negara berkembang. Demikian pula dengan *UN Conference on South-South Cooperation*, di Nairobi-Kenya, tahun 2009 yang menghasilkan *Nairobi Outcome* menunjukkan bahwa KSS merupakan elemen pendorong kerja sama pembangunan yang lebih sesuai dengan negara berkembang menuju kemandirian bersama dan pembangunan yang berkelanjutan.

High Level Forum on Aid Effectiveness di Ghana, tahun 2008 yang menghasilkan *Accra Agenda for Action (AAA)* menyebutkan mengenai pentingnya kerja sama dengan semua pihak, termasuk melalui Kerja sama Selatan-Selatan. *Accra Agenda for Action* mengakui bahwa pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman dari KSS dapat memperkaya agenda “*effectiveness*” dalam kerja sama pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari *Accra Agenda for Action*, dibentuk *Task Team on South-South Cooperation*, yang bertujuan memberikan kontribusi melalui pemetaan dan dokumentasi KSS serta mensinergikan dengan agenda *aid effectiveness*.

Kecenderungan lain yang semakin kuat dalam KSS adalah modalitas kerja sama dengan skema *Triangular Cooperation*. *Accra Agenda for Action* menyebutkan bahwa modalitas ini merupakan titik awal untuk mensinergikan KSS dengan Kerja sama Utara-Selatan terutama dalam peningkatan kapasitas. *Triangular cooperation* diharapkan dapat mendorong terciptanya bentuk baru kemitraan segi tiga antara negara berkembang

dengan mitra kerja sama, yang dapat lebih menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional.

Demikian pula dengan berbagai forum seperti *High Level Events on South-South Cooperation and Capacity Development (HLE/CD)* yang dilaksanakan di Bogota-Colombia, 2010 dan *High Level Forum* yang akan diadakan di Seoul-Korea Selatan, tahun 2011, merupakan arena bagi pengembangan dan peningkatan KSS.

Colombo Plan yang semula dibentuk oleh negara persemakmuran telah berkembang menjadi lembaga multilateral dengan 25 anggota yang terdiri dari negara berkembang dan negara maju. Pendirian *Colombo Plan* bertujuan untuk memberikan dukungan bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program kerja sama teknik dan pertukaran pengalaman di antara negara anggota.

Forum multilateral lain yang signifikan dan telah berkembang lama dalam bidang perdagangan adalah *Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)*. Kesepakatan GSTP pertama kali ditandatangani tahun 1988 sebagai upaya negara-negara berkembang untuk melakukan pertukaran preferensi perdagangan dalam rangka meningkatkan kerja sama perdagangan antar negara berkembang.

Munculnya *new emerging economies* yang kuat seperti India, Cina, dan Korea yang juga memiliki fokus pengembangan di negara-negara selatan lainnya mendorong Indonesia meng-inisiasi hubungan kerja sama dalam lingkup KSS. Sepertinya pembentukan lembaga yang secara khusus menangani KSS telah ikut berperan memperkuat posisi Negara-negara tersebut dalam KSS.

b. Dinamika Kerja sama di Kawasan ASEAN

ASEAN merupakan lingkaran strategis pertama secara regional dalam KSS Indonesia. Terbentuknya komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN akan semakin mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam rangka mencapai Komunitas ASEAN tahun 2015 yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kerja sama ASEAN diarahkan dan dikembangkan untuk pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara MIC dan LIC untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan yang menjadi prioritas bersama. Forum ASEAN ini akan dimanfaatkan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan, sesuai pengalaman yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN secara kolektif.

Isu-isu seperti bencana, *new diseases*, dan masalah lingkungan seperti kebakaran hutan mempengaruhi lingkungan strategis di tingkat kawasan ASEAN. Demikian pula dengan kerja sama yang tertuang dalam *blueprint* ASEAN seperti *ASEAN EconOMIC Community Blueprint* dan *ASEAN Socio-Cultural Blueprint* yang memerlukan penyelarasan dengan program pembangunan dan peraturan perundangan nasional.

Beberapa isu penting yang masih menjadi fokus kerja sama ASEAN kedepan antara lain konektivitas ASEAN, ketahanan pangan dan energi, penyelesaian konflik, arsitektur kawasan Asia Timur, *people centered ASEAN*, kerja sama penanganan bencana alam, dan kerja sama sub-kawasan.

ASEAN merupakan komunitas sub-regional yang cukup maju dalam mengintegrasikan kegiatannya. Pada tahun 2000, negara-negara ASEAN sepakat untuk mempersiapkan ASEAN menuju era digital dengan membuat percontohan Internet hub di bidang pertanian yang berlokasi di Indonesia. Internet hub ini diharapkan dapat memberikan layanan perdagangan bidang agribisnis kepada ratusan petani dan pelaku pasar di kawasan ASEAN. Internet hub juga didukung oleh sektor publik dan swasta termasuk beberapa perusahaan di luar ASEAN. Inisiatif lain untuk memperkuat kerja sama di kawasan ASEAN dapat dilihat melalui disahkannya *ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS)* dan *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS)*.

Kerja sama ASEAN diarahkan dan dikembangkan untuk pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara *MIC* dan *LIC* untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan yang menjadi prioritas bersama. Forum ASEAN ini akan dimanfaatkan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan, sesuai pengalaman yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN secara kolektif.

c. Kerja Sama di Kawasan Regional dan Sub Regional

Komunitas regional dan sub-regional merupakan salah satu faktor pendorong bagi kemajuan KSS. KSS dapat dikembangkan melalui mekanisme kerja sama regional yang telah terbentuk, seperti *South west Pacific Dialogue (SwPD)*, *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*, *Mercado Común del Sur (MERCOSUR)*, dan *Pacific Islands Forum (PIF)*.

Beberapa komunitas regional semakin dinamis dalam menyatukan dan melaksanakan kegiatan di tingkat regional dan sub regional. Di Afrika, komunitas seperti *The Southern African Development Community (SADC)* memainkan peran cukup besar dengan Afrika Selatan sebagai pendorong utamanya. Demikian pula dengan COMESA (*Common Market for Eastern and Southern Africa*) yang telah mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan kerja samanya secara intra regional. COMESA menjalin hubungan yang cukup baik dengan *East African Community (EAC)* dan *the Indian Ocean Commission (IOC)*.

Pertumbuhan signifikan dari negara-negara di kawasan Amerika Latin ditunjukkan dengan semakin banyak negara-negara Amerika Latin yang meningkat menjadi *upper middle income countries*. Hal ini mendorong negara-negara Amerika Latin untuk bekerja sama dengan negara berkembang di kawasan lain melalui pembentukan berbagai forum seperti *IBSA (India, Brazil and South Africa)* dan *FEALAC (Forum for East Asia–Latin America Cooperation)*.

Kawasan Amerika Latin dan Karibia merupakan kawasan yang cukup dinamis di antara kawasan negara-negara berkembang lain. Pembentukan *Andean Community* tahun 1969 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan beberapa piagam seperti *Andean Charter for the Promotion and Protection of Human Rights* dan *Andean Charter for Peace and Security* merupakan upaya integrasi di kawasan tersebut. Kerja sama *Andean Community* dengan *Southern Common Market (MERCOSUR)* menunjukkan kuatnya kerja sama intra kawasan yang menuju proses integrasi yang lebih luas di kawasan Amerika Latin.

d. Kerja Sama Bilateral Antar Negara Selatan

Dalam perkembangannya selama ini, pemerintah Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara selatan dalam kerangka kerja sama pembangunan yang strategis. Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan melalui forum kerja sama bilateral dalam bentuk *joint commission*, *strategic partnership*, dan perjanjian bilateral lainnya. Kerja sama bilateral dinilai efektif untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan volume pelaksanaan KSS karena kerjasama bilateral tidak memerlukan banyak prosedur dan perjanjian/kesepakatan cukup diterima oleh kedua negara saja.

Target negara dalam kerangka kerja sama bilateral penting untuk diperluas sejalan dengan prioritas kawasan serta sesuai dengan komitmen pemerintah. Seiring dengan hal tersebut, perlu adanya strategi dan pendekatan pemerintah dalam mendorong penguatan kerja sama bilateral melalui modalitas yang ada. Isu-isu yang dibawa diarahkan pada pelaksanaan kerja sama teknik yang mengedepankan keunggulan komparatif Indonesia dan mendorong pelaksanaan kerja sama ekonomi di masa mendatang.

IV. PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN KEBIJAKAN KSS INDONESIA KEDEPAN

a. Modal Dasar dan Tantangan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

Pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam pembangunan di berbagai bidang telah diakui oleh dunia internasional, seperti bidang pertanian yang sangat penting dalam menanggulangi kerawanan pangan, kependudukan, penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan *community based development driven*, penanganan bencana alam, dan praktik-praktik penguatan demokrasi.

Politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif menjadi modal dasar bagi Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional dan telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan berbagai negara.

Pengalaman panjang Indonesia dalam menyelenggarakan program Kerja sama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB) yang telah berlangsung sejak tahun 1982 menjadi Modal dasar dalam KSS. KTNB melibatkan berbagai instansi, yaitu lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Dana tersebut

mencakup kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Indonesia, serta kontribusi Indonesia untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama triangular.

Untuk mendukung pelaksanaan kerja sama bilateral, pusat-pusat pelatihan yang selama ini telah menjadi salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kerja sama teknik akan dikembangkan. Dalam hal ini, NAM-CSSTC menjadi salah satu potensi untuk terus dikembangkan dalam rangka mendukung pelaksanaan KSS Indonesia. NAM-CSSTC adalah organisasi yang didirikan oleh negara-negara Non-blok dan berkedudukan di Indonesia yang bertujuan untuk memberi kontribusi terhadap percepatan dan kemajuan pembangunan nasional negara-negara anggotanya melalui kerja sama teknik.

Tantangan dan masalah dalam Kerja Sama Selatan Selatan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam RPJM 2010-2014 tiga permasalahan yang di hadapi KSS Indonesia: (i) belum adanya desain nasional KSS; (ii) Indonesia belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS; dan (iii) belum teridentifikasinya keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia.

Tantangan lain yang dihadapi KSS Indonesia adalah sebagai berikut:

- Munculnya skema baru yang mendorong kerja sama antar kawasan dan desentralisasi KSS yang melibatkan lembaga di luar pemerintah pusat serta melibatkan pemerintah daerah. Peningkatan integrasi kerja sama dalam kawasan maupun antar kawasan merupakan tantangan yang memerlukan suatu strategi untuk dapat memperkuat posisi Indonesia.
- Adanya proteksi dan penutupan akses pasar di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) konvensi antara negara-negara berkembang dengan negara tertentu; (ii) penetapan tariff yang tinggi dan eskalasi tariff maupun kebijakan non-tariff seperti penerapan kuota, larangan impor, dan standar yang terlampaui tinggi.
- Memasukkan isu KSS dalam kerangka peraturan perundangan membutuhkan dukungan politik baik dari eksekutif maupun legislatif.
- Perencanaan program dan kegiatan KSS dengan sumber dana APBN dilakukan secara terintegrasi agar lebih efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran.
- Konsolidasi dan sinergi berbagai elemen KSS yang meliputi kerja sama ekonomi, teknik, politik, sosial dan budaya serta iptek sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal; dan munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru dalam KSS yang menuntut peran proaktif dan antisipatif dalam perencanaan dan pengembangan KSS Indonesia.

Selain permasalahan tersebut, hal lain yang juga menarik adalah terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian utama, yaitu:

- Strategi dan kebijakan KSS Indonesia cenderung masih bersifat *ad hoc*, terfragmentasi (*fragmented points of delivery*) baik dalam penganggaran, perencanaan, koordinasi, maupun monitoring dan evaluasi serta belum diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN;

- Belum adanya kerangka kelembagaan yang secara khusus menangani KSS serta belum tercantumnya KSS secara spesifik dalam perundangan dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan KSS Indonesia mengakibatkan mekanisme dan prosedur KSS belum tersusun dengan baik;
- Belum adanya pengalokasian secara terintegrasi dari APBN untuk membiayai program dan kegiatan KSS, sedangkan pembiayaan kegiatan yang selama ini berasal dari mitra pembangunan mengalami penurunan ketika status Indonesia meningkat menjadi *middle income country*; dan
- Belum adanya sistem informasi serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.

b. Pengembangan KSS Indonesia

Secara internal pengembangan KSS Indonesia memerlukan penguatan kerangka hukum, penguatan kelembagaan, penyusunan mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran KSS, pengembangan sistem informasi, peningkatan promosi dan publikasi, serta penguatan kerangka program.

Pengembangan KSS dari sisi eksternal berupa pemantapan setiap jenis kerja sama ke luar yang terdiri dari kerja sama ekonomi, teknik, politik, sosial dan budaya, serta kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kerja sama diupayakan bersinergi antara satu dan lainnya dan saling melengkapi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Dalam kajian ini melingkupi kerja sama dari aspek ekonomi, dan teknik saja dan tidak mengulas aspek social dan budaya.

i. Penguatan Kerangka Hukum.

Kerangka hukum yang kuat diperlukan agar KSS dapat dilaksanakan secara melembaga dan akuntabel, serta jelas mekanisme pertanggungjawaban dan pertanggungjawabannya. Kerangka hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan luar negeri masih menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara penerima. Perubahan dan peningkatan kondisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah, menuntut adanya upaya untuk mulai merubah paradigma sebagai negara yang berproses memberikan bantuan secara bertahap. Tahapan perubahan tersebut akan tercermin dalam penyusunan kerangka hukum. Hal ini sangat penting agar proses transformasi dapat dilaksanakan dengan legalitas yang memadai. Penguatan kerangka hukum menjadi dasar bagi pemantapan kelembagaan, dan penyusunan mekanisme serta prosedur yang lebih operasional.

Peraturan perundang-undangan pemerintah yang lebih kuat perlu dilakukan sebagai dasar pengembangan pelaksanaan KSS Indonesia lima tahun kedepan. Kerangka hukum merupakan landasan bagi penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan KSS Indonesia. Melalui kerangka hukum, keterlibatan semua pihak dalam KSS Indonesia akan lebih jelas, termasuk peran swasta, LSM/OMS dan Perguruan Tinggi. Payung hukum KSS juga dapat menambah kepercayaan para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan KSS Indonesia.

Revitalisasi kerangka hukum meliputi dasar hukum dan peraturan untuk dua isu utama, yaitu pelaksanaan dan kelembagaan KSS. Pelaksanaan mencakup mekanisme

dan prosedur KSS termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pada saat ini paradigma yang melandasi pengaturan pinjaman dan hibah luar negeri adalah menempatkan Indonesia hanya sebagai negara penerima. Pengembangan peraturan perundang-undangan tentang KSS mengakomodasikan pergeseran dan perkembangan Indonesia yang secara bertahap akan menjadi negara pemberi.

ii. Penguatan Kelembagaan.

Penguatan kelembagaan dan koordinasi dilaksanakan secara bertahap atas dasar kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi, melalui kesepakatan dan keputusan bersama para pihak terkait yang diformulasikan dalam dokumen legal atau formal yang ditetapkan.

Kerangka dasar kelembagaan dalam pelaksanaan KSS terbagi menjadi dua kategori: pertama adalah lembaga yang berfungsi sebagai koordinator, dan kedua adalah lembaga yang berperan dalam pelaksanaan KSS. Lembaga yang berperan sebagai koordinator adalah Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan. Sedangkan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan KSS antara lain Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, BKPM, BKKBN, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, pelaksanaan KSS dapat melibatkan lembaga lain seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, Kadin, swasta, dan masyarakat.

Pelaksanaan KSS Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya, mengingat luasnya keterlibatan para pihak dalam KSS. Berdasarkan kondisi diatas, perlu adanya penguatan kelembagaan dan koordinasi yang meliputi penguatan kapasitas, penyusunan peraturan koodinasi dan kelembagaan, dan prosedur dan mekanisme pelaksanaan KSS.

Meningkat pelaksanaan KSS adalah salah satu upaya untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional, maka diperlukan suatu entitas kelembagaan KSS yang kuat sehingga mampu bergerak secara sistematis, struktural, dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga Pemerintah terkait. Hal ini sejalan dengan amanat yang sudah dituangkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk menuju kepada kondisi ini, tahapan pertama yang akan dilaksanakan adalah memperkuat koordinasi lintas instansi agar sinergisasi antar kementerian dan antar pemangku kepentingan akan semakin baik. Dalam hal ini Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional, yang terdiri dari perwakilan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, KADIN, dan instansi terkait lainnya. Tim ini akan terus diperkuat dan menjadi embrio terbentuknya suatu entitas KSS sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat posisi negosiasi guna mengoptimalkan pembangunan kemitraan yang strategis (*strategic partnership*) dengan seluruh mitra pembangunan internasional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.

iii. Pendanaan

Pada periode pertama, alokasi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah merupakan kunci keberhasilan KSS Indonesia. Untuk itu, diperlukan penyusunan mekanisme dan prosedur pendanaan agar pelaksanaan KSS bisa lebih optimal dan terarah. Agar pelaksanaan KSS dapat lebih terlembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran, diperlukan pos belanja khusus untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan KSS di Negara lain. Hal ini juga perlu dilakukan agar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KSS semakin akuntabel.

Dengan menguatnya KSS, paradigma yang semula hanya menerima bantuan luar negeri mulai berubah, dimana konsep memberi bantuan ke luar negeri juga mulai dielaborasi. Berkaitan dengan pergeseran peran tersebut, harus dipersiapkan secara hati-hati baik terkait dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah baik secara substansi maupun administrasinya. Hal ini dikarenakan peraturan perundangan di Indonesia yang terkait dengan bantuan luar negeri saat ini masih dilandasi oleh paradigma menerima bantuan.

Penyusunan rancangan anggaran kegiatan terkait dengan KSS Indonesia harus sesuai dengan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan penyusunan RAPBN, sehingga pengalokasian pembiayaan KSS dapat lebih optimal.

Munculnya berbagai skema sumber pembiayaan baik skema bilateral dan multilateral perlu terus dijajaki. Demikian pula dengan skema pembiayaan melalui kerja sama triangular yang mulai banyak dilakukan dalam kerangka KSS. Pembiayaan melalui skema-skema tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia.

iv. Penyusunan mekanisme dan prosedur.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan KSS perlu disusun agar pelaksanaan KSS kedepan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. Mekanisme dan prosedur perlu selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan. Hal ini dilakukan agar prosedur dan mekanisme tidak menjadi faktor penghambat fleksibilitas dan ruang untuk pengembangan yang dinamis. Mekanisme yang akan disusun harus melingkupi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan diseminasi, serta *knowledge sharing*.

v. Sistem Informasi KSS Indonesia.

Sistem Informasi dibangun untuk membantu memperlancar bisnis proses dari pelaksanaan kegiatan. Diharapkan sistem informasi tersebut dapat memperlancar dan mendukung proses-proses layanan untuk pelaksanaan kegiatan dan kerja sama yang akan dilakukan. Sistem informasi merupakan alat yang sangat penting sebagai dasar pelaksanaan KSS yang transparan, sistematis dan berkesinambungan. Sistem informasi KSS menjadi dasar monitoring dan evaluasi serta menjadi alat perencanaan dan pengambilan keputusan KSS kedepan. Sistem informasi KSS akan menjadi bagian dari

sistem *knowledge management*, yang pengembangannya dilaksanakan secara bertahap. Mengingat luasnya jangkauan Sistem Informasi, sistem ini juga membuka akses dan memudahkan konektivitas dengan masyarakat luas dan menciptakan ruang untuk networking secara nasional, regional, dan internasional.

vi. Promosi dan Publikasi.

Promosi dan publikasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keterbukaan informasi untuk mencapai KSS Indonesia yang lebih akuntabel. Promosi dan publikasi dilakukan dengan tujuan penyamaan persepsi dan pencapaian konsensus bersama sebagai dasar pengembangan KSS Indonesia kedepan yang berkelanjutan. Pada saat ini pemahaman mengenai KSS masih sangat beragam. Sebagian besar masih memandang KSS hanya sebagai kegiatan *charity* berkaitan dengan solidaritas antar sesama Negara berkembang.

vii. Penguatan Kerangka Program

Program KSS selama ini difokuskan pada program kerja sama teknik. Dengan bergesernya fokus program pada kerja sama ekonomi, maka program KSS kedepan akan dimodifikasi mengarah pada kombinasi antara program kerja sama teknik dan program kerja sama ekonomi. Sedangkan untuk memenuhi prioritas program KSS, harus disusun program kerja sama ekonomi yang didukung oleh program kerja sama teknik, politik-sosial-budaya, dan iptek.

viii. Pengembangan Pelaksanaan KSS Secara Eksternal

Dalam pelaksanaan KSS Indonesia, seluruh rangkaian kerja sama akan mengarah pada proses integrasi dan penguatan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan melalui kerja sama teknik, ekonomi, politik, sosial budaya dan iptek. Rangkaian kerja sama ini diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia. Program-program kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap dan didasarkan pada kesepakatan dengan pihak terkait yang selama ini telah melaksanakan berbagai kerja sama tersebut antara lain.

ix. Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi Negara-negara selatan yang dilandasi oleh prinsip mutual opportunity dan mutual benefit serta solidaritas sangat penting dalam mendukung negara-negara selatan untuk lebih berperan dalam konstelasi ekonomi global. Hal ini juga dapat meningkatkan posisi tawar atas Negara-negara maju dan menciptakan sistem perekonomian dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Prospek Ekonomi Global 2011 yang diluncurkan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa perekonomian dunia beralih dari fase pemulihan pasca krisis menuju ke pertumbuhan yang kuat meskipun secara perlahan pada tahun-tahun mendatang, dimana separuh dari pertumbuhan global tersebut berasal dari negara berkembang.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global ke depan yang lebih positif mendorong Indonesia untuk semakin berperan di dunia internasional. Keanggotaan

Indonesia dalam G-20, perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di tengah krisis global, serta kinerja diplomasi internasional merupakan stimulan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia yang menjadikan Indonesia memiliki peran sentral dalam berbagai forum multilateral maupun regional. Peran sentral ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional dan kerja sama investasi.

Kerja sama ekonomi dalam kerangka KSS akan ditempatkan sebagai bagian dari kerangka desain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPPPEI) 2011-2025, utamanya dalam mendukung percepatan dan perluasan pada enam koridor ekonomi untuk memperluas pasar luar negeri sesuai dengan potensi yang dikembangkan dalam setiap koridor tersebut.

Konsentrasi pada peningkatan kegiatan yang menjadi prioritas dalam produk utama, produk potensial dan produk jasa serta sub sektor industri kreatif yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan serta produk-produk pihak swasta yang menjadi unggulan dan prioritas KADIN. Walaupun tidak semuanya dapat dilaksanakan, namun penting untuk secara berkelanjutan dilaksanakan melalui analisis potensi untuk melihat produk serta potensi dan *market intelligent* untuk pengembangan sektor ekonomi lebih lanjut.

Untuk mendukung pelaksanaan kerja sama ekonomi, pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat koordinasi antar lembaga dan institusi, infrastruktur dan lingkungan pendukung, baik di dalam negeri melalui penguatan kerangka hukum, kelembagaan, mekanisme pembiayaan dan sistem perbankan, serta penguatan pada strategi untuk peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti penguatan negosiasi perdagangan dan investasi Indonesia di luar negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional akan terus dikuatkan

Salah satu elemen yang akan menjadi arus utama dalam kerja sama ekonomi adalah peningkatan kapasitas, baik untuk pelaku ekonomi dalam negeri maupun perwakilan tetap Indonesia di luar negeri, serta pihak-pihak di luar negeri sebagai penerima manfaat. Peningkatan kapasitas ini termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem dan fasilitas perekonomian di dalam negeri serta kemampuan penerima manfaat. Peningkatan kapasitas ini akan sangat terkait dengan pelaksanaan kerja sama teknik yang akan dilakukan.

Dalam KSS, kerja sama ekonomi yang dilaksanakan juga melingkupi bidang perdagangan, jasa dan investasi.

- **Kerja Sama Perdagangan**

Krisis keuangan global yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara-negara ekonomi di negara-negara maju dan berkembang beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pentingnya mengembangkan alternatif perdagangan. Dalam situasi tersebut, tepat apabila dikembangkan kerja sama perdagangan yang lebih erat di antara sesama negara berkembang melalui KSS. Hal ini dikarenakan potensi, kapasitas dan prospek yang dimiliki oleh Negara-negara selatan cukup besar namun perlu digali secara lebih strategis dan mendalam.

KSS menjadi salah satu peluang strategis bagi Indonesia untuk terus meningkatkan akses pasar dan fasilitasi ekspor. Kerja sama perdagangan dengan negara-negara selatan dapat menjadi salah satu program unggulan (*flagship*) KSS Indonesia. Kinerja ekspor non migas harus diikuti dengan upaya peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri, peningkatan daya saing ekspor, serta peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional.

Persaingan memperoleh akses di pasar tradisional maupun non-tradisional akan semakin ketat. Negara seperti Cina, Korea Selatan dan India berkembang semakin kuat menguasai pasar di berbagai kawasan. Sementara negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai memperkuat dan mengembangkan potensi mereka untuk bersaing dalam memperoleh akses dan pasar. Menghadapi persaingan ketat antar sesama negara berkembang, Indonesia telah melakukan diversifikasi dengan membangun struktur produk ekspor non-migas yang semula didominasi oleh komoditi bernilai tambah rendah (ekspor non-manufaktur), bergeser pada komoditi yang bernilai tambah relatif tinggi, yaitu sektor Industri.

Ekspor non-migas Indonesia selama beberapa tahun terakhir tertuju pada negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, China, Malaysia, India dan Korea Selatan. Namun demikian, laju pertumbuhan ekspor non-migas ke beberapa pasar non-tradisional seperti Vietnam, Uni Emirat, Arab Saudi, Bangladesh, Mesir, Pakistan, Turki, Iran, Afrika Selatan dan Meksiko menunjukkan pertumbuhan positif.

Kelancaran arus barang ekspor Indonesia ke negara-negara selatan dapat terhambat diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas kelembagaan (institusi), keterbatasan pendanaan, dan proteksionisme yang berlebihan. Untuk lebih memperkuat pengembangan ekspor ke berbagai negara berkembang lain dilakukan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas para pemangku kebijakan di negara berkembang dalam membangun kerangka peraturan usaha dan perdagangan. Pengalaman Indonesia dalam membangun sistem usaha dan perdagangan dapat dibagi kepada pejabat di negara-negara berkembang lainnya dalam satu paket, seperti “*Sharing Experience on Business Development*”;
- Perlu dikembangkan bantuan pendanaan (*trade financing*) dalam bentuk skema pembayaran yang lebih lunak atau skema perdagangan lain yang tidak memberatkan keuangan baik bagi Indonesia sebagai negara pengekspor, maupun negara berkembang lain sebagai negara pengimpor;
- Untuk meningkatkan arus perdagangan, kebijakan yang bersifat *barriers to trade* dapat dikategorikan sebagai *unnecessary obstacle to trade* dan perlu diselesaikan melalui tahap awal berupa dialog bilateral yang dikemas dalam paket “*Trade Facilitation Program*”;

- Diseminasi peraturan perdagangan di Indonesia yang diintegrasikan dengan program bantuan di bidang jasa dan investasi kerja sama teknik dalam satu program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di negara-negara berkembang;
- Melakukan inovasi melalui pemanfaatan berbagai skema perdagangan, seperti imbal dagang sebagai alternatif pola perdagangan dalam rangka penetrasi di pasar non-tradisional;
- Mensinergikan potensi produk unggulan nasional dengan potensi pasar baru untuk ekspansi dengan cara mempertajam *assessment* potensi pasar dan menyusun kriteria dasar produk unggulan nasional. Proses *assessment* dimaksudkan untuk menjajaki kerja sama ekonomi bidang perdagangan, dengan penyelenggaraan konferensi perdagangan untuk dapat dilakukan promosi produk unggulan di negara tujuan;
- Mensinergikan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan antara pemerintah dan swasta untuk mendukung pencapaian strategi-strategi kerja sama perdagangan yang ditetapkan bersama;
- Memperbaiki kerangka regulasi perdagangan dan ekspor, termasuk infrastruktur penunjang dan advokasi terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk Indonesia yang dipasarkan;
- Melaksanakan promosi dan publikasi untuk barang-barang ekspor dan kegiatan yang memiliki keterkaitan antara pelaksanaan kerja sama teknik yang mendukung kerja sama ekonomi.

Tujuan yang dapat dicapai melalui strategi ini adalah:

- Meningkatnya pertumbuhan ekspor non-migas sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional;
- Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik;
- Meningkatnya kualitas produk untuk memenuhi permintaan dan standar internasional;
- Diversifikasi produk ekspor non-migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang;
- Terintegrasinya kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kerja sama perdagangan;
- Memperlancar pelaksanaan kerja sama perdagangan dan mengurangi risiko yang muncul di dalam negeri melalui perbaikan sistem, infrastruktur pengelolaan dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual serta promosi dan publikasi yang terintegrasi.

Strategi dan kerja sama bidang perdagangan dan ekspor ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan dan fokus kegiatan yang lebih terarah dan spesifik

serta terintegrasi dengan sistem pembiayaan dan perbankan untuk mendukung peningkatan volume ekspor. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan pada penciptaan sarana dan prasarana yang kondusif dan terintegrasi dengan kerja sama bidang jasa dan investasi, serta terkait dengan pelaksanaan kerja sama teknik yang dapat mendukung peningkatan kualitas kegiatan.

- **Kerja Sama dalam Bidang Jasa**

Peranan sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi terus mengalami perkembangan seiring dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, kemajuan teknologi, dan keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas. Kebutuhan jasa yang serupa di tiap negara memiliki potensi yang besar bagi persaingan global dalam penyediaan jasa yang mutakhir dan disesuaikan dengan kondisi wilayah negara yang bersangkutan.

Perkembangan sektor jasa saat ini dipengaruhi oleh globalisasi atau liberalisasi baik di bidang perdagangan maupun investasi. Kini semakin marak transaksi yang bersifat lintas batas negara dimana hal tersebut bisa dimungkinkan terjadi karena adanya jasa lembaga keuangan. Seiring dengan makin globalnya perekonomian melalui arus perdagangan dan investasi, kebutuhan akan jasa intermediasi dan manajemen risiko juga kian meningkat.

Meski demikian, terdapat perbedaan laju perkembangan sektor jasa antara negara maju dengan negara berkembang, sehingga lebih kompetitif dari sisi biaya, kualitas, dan jenis jasa. Dengan kondisi ini, kerja sama jasa lebih banyak dilakukan oleh negara berkembang dengan negara maju, bukan sesama negara berkembang. Padahal kerja sama jasa merupakan bidang yang berpotensi untuk dikerja samakan lebih lanjut karena memiliki *transfer of knowledge* yang dapat dimanfaatkan dengan lebih cepat.

Menyikapi hal tersebut, KSS berperan penting untuk terus mendorong meningkatkan kerja sama jasa di Negara-negara selatan sebagai langkah tindak lanjut dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkup regional. Misalnya dalam kerangka ASEAN, jasa menjadi salah satu kesepakatan dan persetujuan sebagai bagian dari empat pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN sudah menyepakati beberapa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dalam bidang jasa teknik, keperawatan, arsitektur, survei, akuntan, medis, dan manufaktur alat kesehatan.

Strategi pengembangan kerja sama jasa dapat diarahkan pada prioritas pemerintah sebagai berikut:

- Menfokuskan kerja sama bidang jasa pada jasa konstruksi, tenaga kerja profesional dan bidang-bidang lain yang potensial;
- Untuk bidang jasa konstruksi, akan diperkuat koordinasi dengan Kementerian terkait dan pihak swasta untuk pelaksanaan kegiatan yang berjalan. Hasil dari kegiatan tersebut akan dipublikasikan dan di *sharing* kepada Negara-negara Selatan lainnya;

- Mensinergikan penguatan kapasitas tenaga kerja Indonesia dengan kerja sama teknik untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan standar internasional yang ada;
- Mengembangkan sistem informasi untuk memetakan tenaga kerja profesional yang dimiliki oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.
- Selain itu, perlu dilakukan sinergi dan sinkronisasi dengan peningkatan investasi yang dapat mendorong penggunaan jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya untuk tenaga profesional.

Tujuan yang dapat dicapai melalui kerja sama jasa adalah untuk:

- Pemanfaatan kapasitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat meningkatkan kerja sama ekonomi.
- Mempromosikan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat digunakan oleh negara-negara selatan pada sektor kegiatan tertentu yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa negara.
- Meningkatkan kualitas sumber daya dan kemampuan dibidang konstruksi untuk menarik negara-negara selatan lain untuk menggunakan jasa Indonesia, serta mempromosikan lembaga pendidikan untuk memperkuat jasa di bidang unggulan yang dimiliki Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama jasa diharapkan dapat mengarah pada pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia secara profesional, serta penggunaan teknologi konstruksi Indonesia secara lebih luas di negara-negara selatan. Selain itu, tetap dibuka kemungkinan untuk pengembangan kerja sama dibidang jasa lain dimasa yang akan datang.

- **Kerja sama Investasi**

Investasi merupakan salah satu komponen penting dari strategi pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Investasi memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Terciptanya akumulasi modal dapat meningkatkan produktivitas seiring dengan peningkatan investasi.

Kerja sama investasi dalam KSS merupakan salah satu dimensi penting kerja sama ekonomi yang secara lebih luas bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan negara berkembang. KSS diharapkan dapat lebih berperan dalam meningkatkan arus modal ke negara berkembang yang sempat menurun karena krisis ekonomi global pada tahun 2008.

UNCTAD (2009) dalam *World Investment Prospect 2009-2011* melaporkan bahwa prospek untuk investasi di Indonesia menduduki peringkat ke-9 (sembilan) yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia cukup prospektif. Hal ini terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Dengan posisi ini dan dengan ditandatanganinya BIT antara Indonesia dengan beberapa negara berkembang, diharapkan realisasi investasi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara berkembang lainnya.

Pemerintah perlu mengembangkan strategi, sistem, infrastruktur dan mekanisme untuk pengembangan investasi terutama investasi Indonesia di luar negeri. Peraturan dan kerangka regulasi yang ada saat ini hanya mengatur investasi di dalam negeri.

Indonesia perlu lebih proaktif dalam menjajaki kemungkinan investasi di negara berkembang lain, kendati menghadapi banyak permasalahan. Beberapa perusahaan nasional telah melakukan kerja sama dengan mitra di Afrika serta di kawasan Asia Pasifik. Semakin terbukanya informasi mengenai peluang investasi di Afrika dan Asia Pasifik diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan investasi Indonesia di negara berkembang.

Strategi pengembangan investasi Indonesia di negara-negara berkembang dapat dilakukan melalui:

- Menciptakan dan memperkuat iklim dan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan investasi secara internal yang dapat memperkuat pelaksanaan investasi di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kerangka kerja dan regulasi serta standarisasi investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi di negara-negara selatan.
- Pelaksanaan kerja sama investasi akan dikembangkan secara sinergis dengan kerja sama perdagangan dan ekspor, dimana diharapkan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia di negara selatan diiringi pula dengan pembukaan pabrik-pabrik baru di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sejalan dengan penggunaan sumber daya teknologi dan tenaga kerja Indonesia.
- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar dapat bersaing dengan negara lain di pasar negara-negara selatan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat terkait dengan kerja sama teknik yang dijalankan pemerintah.
- Mengarahkan dan memperkuat perusahaan kecil dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak investasi Indonesia di negara-negara selatan melalui penguatan program kegiatan antar investor besar dengan investor kecil-menengah serta memperkuat kerangka, infrastruktur dan advokasi yang dapat mendukung investor kecil-menengah berkembang di pasar negara-negara selatan.
- Tujuan yang dapat dicapai dari penguatan kerja sama investasi ini adalah untuk:
 - ✓ Mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Diharapkan pengembangan investasi ini dapat sejalan dengan penguatan kerja sama perdagangan dan kerja sama jasa.
 - ✓ Meningkatkan ekspor dan kerja sama perdagangan melalui pembangunan pabrik-pabrik di luar negeri yang diharapkan dapat membuka pasar baru dari Indonesia ke negara-negara selatan (*invest for trading*).

Di masa yang akan datang, kerja sama investasi ini dapat diarahkan pada pembukaan pasar baru dan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia di negara-negara selatan. Oleh sebab itu, penting untuk membuat *linkage program* dengan memanfaatkan kapasitas di bidang perdagangan melalui sektor-sektor unggulan

dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah akan memfasilitasi dan memperbaiki sistem dimana swasta dan UMKM menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya.

Integrasi kerja sama ekonomi yang didukung kerja sama teknik, politik sosial budaya, dan iptek akan lebih mudah diwujudkan melalui bantuan proyek pembangunan. Bantuan proyek merupakan kombinasi seperti pengadaan peralatan atau barang, penugasan tenaga ahli, dan program pelatihan yang dilaksanakan dalam satu program terintegrasi. Bantuan proyek dapat menjadi salah satu jalan untuk membuka akses bagi pemasaran produk barang dan jasa dari Indonesia.

- **Kerja sama Teknik**

Kerja sama teknik negara berkembang pada dasarnya adalah sebuah proses dimana dua negara berkembang atau lebih melaksanakan program pembangunan secara individu atau kolektif melalui pertukaran pengetahuan, keahlian/keterampilan, sumber daya dan pengetahuan teknis. Kerja sama teknik selama ini merupakan salah satu pilar KSS yang banyak dilakukan oleh negara berkembang.

Program kerja sama teknik Indonesia merupakan refleksi dari keberhasilan dan pengalaman Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan dan menjadi dasar bagi Indonesia untuk merancang program kerja sama teknik kedepan. Strategi umum dan arah kebijakan dalam meningkatkan kerja sama teknik dalam KSS antara lain:

- Kerja sama teknik yang relatif fleksibel dan efisien, diletakkan secara strategis untuk kolaborasi dan memperkuat kerja sama ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta iptek. Kerja sama teknik mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah agar dapat menjadi koordinator dan eksekutor yang lebih kontributif dalam peningkatan kerja sama ekonomi kedepan.
- Pelaksanaan kerja sama teknik dalam KSS Indonesia ke depan diarahkan dan diprioritaskan kepada kerja sama teknik yang dapat memberikan keuntungan ekonomi (*econoMIC return*) melalui pembukaan akses dan pasar serta peningkatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara selatan.
- Mensinergikan penguatan kapasitas tenaga profesional dalam kerja sama teknik dengan pelaksanaan kerja sama di bidang jasa terutama dalam memenuhi kebutuhan dan pasar di negara-negara selatan.
- Pelaksanaan kerja sama teknik dalam KSS ke depan difokuskan dalam hal: (i) program pelatihan, (ii) pengiriman tenaga ahli profesional, dan (iii) beasiswa.

Program Pelatihan. Program pelatihan memainkan peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan tidak saja memberikan pengetahuan bagi pesertanya, namun juga dapat menjadi sarana pertukaran budaya, serta mempererat hubungan antar individu dan antar lembaga. Pengembangan program pelatihan dalam KSS dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- **Peningkatan Fasilitas Pelatihan.** Pemanfaatan berbagai fasilitas pelatihan di kementerian/lembaga selain dapat meningkatkan nilai positif mengenai

kemampuan yang dimiliki Indonesia, juga dapat memperkuat keberadaan lembaga-lembaga tersebut di tingkat internasional. Mengingat banyaknya fasilitas yang dimiliki kementerian/lembaga yang dapat dimanfaatkan dalam rangka KSS, maka diperlukan optimalisasi peran dan fungsi yang mengarahkan fasilitas-fasilitas tersebut pada “*internationally recognized center of excellence*”.

- Peningkatan Kemampuan Para Instruktur. Keberhasilan pelaksanaan program pelatihan kerja sama teknik Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan para instruktur pelaksana. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas para instruktur mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk semakin meningkatkan kredibilitas lembaga dan negara pelaksana pelatihan. Disamping itu diperlukan standarisasi untuk menjaga kualitas, dan peremajaan instruktur agar terjadi kesinambungan pengetahuan dan alih generasi.
- Peningkatan Kualitas Program Pelatihan. Materi dan metodologi pelatihan merupakan salah satu pilar penting dalam program pelatihan. Penyusunan materi dan kurikulum diperlukan dengan mengembangkan konsep pelatihan terintegrasi yang meliputi: 1) kajian kebutuhan pelatihan; 2) rumusan tujuan pelatihan; 3) rancangan program pelatihan; dan 4) evaluasi program pelatihan. Peningkatan materi dan kurikulum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan paradigma dari *training oriented* ke *learning oriented* yang menekankan pada pembelajaran aktif.
- Selain kurikulum, program pelatihan juga perlu memuat materi mengenai perkembangan pembangunan dan pengenalan budaya Indonesia termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya untuk mempererat persaudaraan antar bangsa peserta negara berkembang dengan Indonesia.
- **Peningkatan Kemampuan Tenaga Ahli.** Permasalahan dan kompleksitas yang dihadapi negara berkembang menuntut para tenaga ahli untuk melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuannya. Selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat teknis, pengetahuan non-teknis juga diperlukan untuk dapat melakukan adaptasi terhadap lingkungan tempat penugasan. Pengalaman tenaga ahli Indonesia yang ditugaskan di negara-negara selatan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang budaya dan bahasa setempat dapat mendukung pelaksanaan tugas mereka. Pengetahuan tentang perkembangan isu-isu global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan bagi tenaga ahli Indonesia. Peningkatan kemampuan tenaga ahli Indonesia dilakukan agar para tenaga ahli tersebut dapat berkompetisi dengan tenaga ahli dari negara berkembang lain serta dapat memenuhi standar internasional dan kebutuhan negara berkembang.
- Pengembangan Sistem Informasi Tenaga Ahli. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi mengenai tenaga ahli dapat memberi beberapa manfaat, yaitu:
 - ✓ memudahkan dalam memberikan informasi lowongan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga ahli Indonesia;

- ✓ keterbukaan informasi memungkinkan pihak ketiga untuk melihat daftar tenaga ahli Indonesia yang tersedia;
- ✓ melalui sistem informasi dan database, dapat dikembangkan jejaring antar tenaga ahli untuk dapat saling berinteraksi, baik antar sesama tenaga ahli Indonesia maupun antar tenaga ahli negara berkembang;
- ✓ sistem informasi yang dikembangkan dapat digunakan untuk memetakan *supply* dan *demand* dalam pelaksanaan kerja sama teknis dan kerja sama di bidang jasa dengan negara-negara selatan.

Beasiswa. Beasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam kerja sama teknik. Beasiswa untuk pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya memajukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa.

Melalui program beasiswa, Indonesia dapat meningkatkan jangkauan kerja sama dengan universitas, mitra kerja sama internasional, lembaga swadaya masyarakat dan donor lainnya. Selain itu, penerima beasiswa dapat lebih mengenal berbagai isu pembangunan di Indonesia dan mendapatkan kesempatan untuk dapat lebih mengenal budaya Indonesia.

Pemberian beasiswa kepada negara-negara berkembang dapat membantu mendorong naiknya peringkat universitas-universitas di Indonesia menuju *World Class University*. Kedepan, peranan universitas-universitas di Indonesia dalam menyelenggarakan program beasiswa bagi negara-negara berkembang akan semakin meningkat seiring dengan naiknya peringkat beberapa universitas di Indonesia.

Sebagaimana dihadapi pilar lain dalam kerja sama teknik, salah satu kelemahan dalam program beasiswa adalah tidak tercatatnya data peserta program dengan baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan sistem informasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengetahui perkembangan pasca mengikuti program beasiswa. Sistem informasi tersebut juga dapat menjadi *liaison* dengan lembaga pendidikan dan berbagai komunitas di negara yang bersangkutan yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendirian ikatan alumni untuk menjalin kesinambungan hubungan antara penerima beasiswa dengan universitas.

c. Mekanisme Pelaksanaan KSS Internal

KSS Indonesia dapat dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan secara aktif para pihak selain pemerintah pusat antara lain dengan pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Pelaksanaan KSS Indonesia di daerah diharapkan dilaksanakan selaras dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan KSS tidak hanya melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan, tidak hanya di pusat melainkan juga pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan Universitas. Hingga saat ini, bentuk-bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri masih sangat terbatas, misalnya melalui kerja sama *sister city* dan *sister province*.

Hambatan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah regulasi di pusat dan daerah yang belum memadai untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Oleh sebab itu penting untuk menyusun kerangka dan lingkungan strategis untuk pengembangan dan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KSS. Penguatan kerangka kerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat dirancang dengan:

- Menyelaraskan rencana kerja sama dan peran aktif daerah berdasarkan RPJM Nasional dan RPJM Daerah;
- Mendukung terciptanya lingkungan dan infrastruktur yang kondusif dan integratif untuk kerja sama pemerintah daerah dalam KSS;
- Mendorong pengembangan potensi daerah untuk menjadi produk unggulan;
- Mendorong pengenalan, promosi dan perluasan produk lokal yang memperhatikan HAKI; dan
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia di daerah.

Berdasarkan hal di atas, penting untuk menyusun kerangka hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat keterkaitan antara pusat dan daerah serta mitra terkait untuk meningkatkan peran daerah yang lebih spesifik dalam KSS. Penting juga untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif dari masing-masing daerah, serta memperhatikan dan menindaklanjuti persoalan atas HAKI dari produk unggulan di daerah.

Perguruan Tinggi. Kerja sama yang melibatkan Perguruan Tinggi telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan mendapat penerimaan yang baik dari berbagai negara berkembang. Pemberian beasiswa kepada negara-negara berkembang meningkat ketika Indonesia menjadi ketua GNB dan kemudian diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta negara berkembang. Program yang ditawarkan pun semakin meningkat termasuk program Pasca Sarjana (Magister).

Perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam KSS sebagaimana banyak diutarakan berbagai pihak dalam forum dan arena internasional. Sejak tahun 1992 universitas-universitas di Indonesia telah terlibat dalam penyelenggaraan program beasiswa bagi mahasiswa dinegara berkembang anggota Non Blok.

Kemitraan dengan Perguruan Tinggi ke depan perlu ditingkatkan dan diperkuat dengan memberikan peran yang lebih besar pada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan dapat menjawab berbagai kecenderungan dan tantangan serta dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan negara berkembang.

Peningkatan peran Perguruan Tinggi dapat disinergikan dengan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan KSS di bidang iptek untuk menghasilkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara-negara berkembang.

NAM-CSSTC. Peran lembaga internasional yang ada di Indonesia seperti *Non Aligned Movement Centre for South-South and Technical Cooperation* (NAM CSSTC) perlu semakin dikembangkan karena potensi dan fasilitas yang dimiliki. NAM CSSTC

diharapkan dapat dikembangkan sebagai pusat pengembangan kerja sama teknik terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia maupun pihak-pihak terkait di luar negeri.

Pengembangan NAM CSSTC diarahkan untuk dibiayai oleh pemerintah, *co-sharing* dengan negara selatan lainnya, atau mekanisme lain yang memungkinkan di masa depan. Dalam hal pengembangan program, akan diarahkan pada pelaksanaan kerja sama teknik yang terintegrasi dengan kerja sama ekonomi. Struktur kelembagaan NAM CSSTC akan disinergikan dengan struktur kelembagaan KSS Indonesia.

d. Mekanisme Pelaksanaan KSS Secara Eksternal

- Multilateral dan Global

Dalam forum multilateral seperti PBB, G-20, OKI, dan forum-forum lainnya, Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan advokasi pelaksanaan KSS antara negara berkembang dan negara miskin. Dalam forum multilateral dan global, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki untuk semakin meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan penekanan pada peningkatan kapasitas bersama secara setara.

Isu-isu yang diangkat dalam forum tersebut diarahkan pada pelaksanaan kerja sama pembangunan yang terintegrasi. Selain itu, forum-forum tersebut dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan publikasi dari pelaksanaan KSS Indonesia untuk semua bidang kegiatan.

- Regional

Pelaksanaan kerja sama regional akan diarahkan pada peningkatan peran Indonesia dalam forum regional ASEAN. Dalam forum ini, Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong kerja sama-kerja sama Ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kapasitas melalui kerja sama teknik. Indonesia diharapkan dapat mendorong penguatan dan kualitas kerja sama dengan negara-negara *LIC* baik di ASEAN maupun regional lainnya.

Dalam forum regional lainnya, diharapkan Indonesia dapat berperan lebih aktif sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan KSS. Kontribusi Indonesia dapat diarahkan pada keunggulan komparatif dari pelaksanaan Kerja sama Ekonomi yang mengarah pada peningkatan kapasitas dan keuntungan bersama pihak-pihak yang terlibat.

- Bilateral

Dalam kerja sama bilateral, pelaksanaan KSS akan diarahkan pada penguatan forum-forum kerja sama bilateral seperti *Joint Commission* maupun melalui perjanjian bilateral yang dilakukan. Forum-forum kerja sama bilateral akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kerja sama teknik yang mendukung pelaksanaan kerja sama ekonomi. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti KADIN untuk pelaksanaan kerja sama bilateral tersebut.

Kerja sama bilateral akan mengarah pada pengembangan kerja sama yang telah dilakukan maupun pengembangan kerja sama baru dengan negara-negara selatan potensial sesuai dengan target area dari KSS Indonesia.

e. Kebijakan KSS Indonesia kedepan

Kebijakan pelaksanaan KSS Indonesia dibagi dalam tiga periode pelaksanaan: i) periode pertama untuk tahun 2011 sampai dengan 2014, ii) periode kedua tahun 2015 sampai dengan 2019, dan iii) periode ketiga tahun 2020 sampai dengan 2025.

Kebijakan pengembangan KSS Indonesia 2011-2014 harus difokuskan pada penguatan koordinasi dan konsolidasi berupa perumusan kerangka hukum, penguatan kelembagaan, pendanaan, sistem informasi, promosi dan publikasi, serta penguatan kerangka program.

Pengembangan KSS pada periode kedua adalah penguatan dan perluasan KSS Indonesia yang meliputi kelembagaan, penguatan dan perluasan kerja sama, pengembangan program baru, pengembangan dan pelibatan yang lebih luas, peningkatan dan perluasan jangkauan, serta evaluasi.

Pada periode ketiga, pengembangan KSS akan difokuskan kepada peningkatan dan perluasan kerja sama, pengembangan program baru, peningkatan keterlibatan lembaga non pemerintah, peningkatan dan perluasan jangkauan, dan evaluasi.

IV. LESSON LEARN DARI COMPARATIVE STUDY ON THE MANAGEMENT SOUTH SOUTH COOPERATION

Bappenas melalui TIM Pengembangan KSS telah melaksanakan kunjungan ke Brazil dalam rangka *Comparative Study on the Management of South-South Cooperation in Indonesia*, pada tanggal 1-6 November 2011 di Brazil. Kunjungan TIM KSS dimaksudkan untuk mempelajari lebih jauh mengenai pengelolaan Kerja sama Selatan-Selatan yang dilakukan oleh Brazil. Kunjungan dilakukan ke beberapa instansi diantaranya:

- Kementerian Luar Negeri dan *Agencia Brasileira De Cooperacao* (ABC)
- Kementerian Pendidikan,
- Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi,
- Kementerian Pembangunan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan,
- Kementerian Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen,
- Kementerian Pertanian dan *EMBRAPA*,
- *IPEA*,
- *USAID* Brazil,
- *JICA* Brazil, dan
- *Police Community*.

Agencia Brasileira De Cooperacao (ABC) *Brazilian Agency for Cooperation* mempunyai visi: membantu upaya negara berkembang lain dalam membangun landasan perubahan menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Melalui visi ini Indonesia dapat mengambil pelajaran Brazil bahwa Brazil telah meningkatkan kesan (*image*) dan meningkatkan martabat (*prestige*) serta menumbuhkan rasa bangga pada rakyat Brazil

karena telah memberikan bantuan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh negara-negara berkembang sehingga. Dampaknya antara lain Brazil didukung negara-negara yang dibantu dan terpilih sebagai Dirjen FAO.

Selama melaksanakan berkunjung di kelembagaan *Brazilian Agency for Cooperation* (ABC) Delri mempelajari kelembagaan ABC. ABC berada di bawah Kementerian Luar Negeri sejak 1987, dan dikepalai oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Menteri Luar Negeri. Lingkup kerja ABC Hanya untuk kerjasama teknik dalam kerangka KSS dan triangular. Kewenangannya antara lain koordinasi dengan K/L, memberikan persetujuan untuk usulan program kerjasama teknik. Fokus kerja samanya pada sektor Pertanian, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan dan dalam bentuk *capacity building*, *transfer of knowledge*, dan *sharing of best practices and experiences*. Kontribusinya selama 3 tahun terakhir meningkat dari USD 8 juta menjadi USD 50 juta. ABC Memiliki 160 personil yang terdiri dari diplomat dan outsourcing melalui Pemerintah atau UNDP. ABC akan menjadi lembaga independen yang lepas dari Kementerian Luar Negeri, memiliki alokasi budget sendiri, dan terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan (development policy) untuk KSS. ABC sedang menyusun policy and legal framework untuk KSS.

Prinsip-prinsip kerja sama teknik meliputi (i) Solidaritas (ii) Demand Driven (tidak menawarkan kerjasama, melainkan merespon demand dari negara lain). (iii) *Acknowledge local experience and adaptation of Brazilian's experience* (iii) Anti-kondisionalitas melalui pemberian bantuan tanpa syarat untuk diikuti dengan kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi (iv) Non-profit Disampaikan bahwa TC tidak mengaitkan dengan kepentingan ekonomi bagi Pemerintah dan rakyat Brazil. Dalam kunjungan ke lembaga ini beberapa pelajaran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- ABC memiliki fungsi koordinasi yang sangat kuat untuk semua kerja sama teknik, sementara pelaksanaan kegiatan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah.
- *One gate policy* untuk kerjasama teknik sebagai badan koordinasi, perlu untuk juga melakukan sendiri program tertentu atau berperan sebagai *executing agency*.
- Secara formal ABC dan jajaran Pemerintah Brazil kompak menyampaikan bahwa hanya menangani Kerjasama Teknik tanpa mengaitkan dengan Kerjasama Ekonomi.
- Namun berdasarkan pendapat ahli fakta di lapangan menunjukan bahwa kegiatan ekonomi antara Brazil dengan negara-negara berkembang (terutama di Afrika) yang dibantu meningkat cukup signifikan. Masuknya sektor swasta Brazil ke Afrika dibantu dengan keberadaan *Brazilian Development Bank* (BNDES) sebagai funding instrument.
- Sehingga Kerja sama Ekonomi sebenarnya masih dapat dipertimbangkan dengan kemasan yang halus dan berdasarkan prinsip transparan dan *win win/win win win solution*.

Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan KSS di bidang pengetahuan dan teknologi dengan SEPED, AEB, dan CNPq. Dengan SEPED dan AEB, Indonesia dapat mengirimkan para peneliti di bidang biodiversity, bioteknologi, dan teknologi luar angkasa untuk bekerjasama dengan para peneliti Brazil. Sementara dengan CNPq, Indonesia ditawarkan untuk membuka beberapa program universitasnya yang mendapatkan penghargaan internasional dalam menerima mahasiswa dan peneliti Brazil. Disamping itu, universitas dan pusat penelitian di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan pengajar/peneliti untuk bekerja di pusat-pusat penelitian di Brazil.

Direktorat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Luar Negeri. Telah ditandatangani persetujuan pengurangan tarif diantara negara berkembang (GSTP) dan Brazil berkomitmen untuk menurunkan tarif atas 30% produk import. Pihak Brazil berharap dibuka peluang kerjasama dalam mendatangkan produk daging sapi dari Brazil ke Indonesia, produk Brazil tersebut tidak akan merugikan industri daging sapi dalam negeri mengingat jumlahnya tidak besar dibanding impor Indonesia dari negara lainnya. Brazil mengharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, transportasi laut dan udara serta pariwisata. Indonesia menyambut baik peningkatan kerja sama dengan prinsip win-win bagi kedua belah pihak dan menyampaikan perlunya meningkatkan perdagangan *south-south trade* dalam konteks *emerging economies*. Brazil mempunyai kebijakan bahwa kerjasama teknik tidak terkait dengan kerja sama perdagangan yang dilakukannya. Pelajaran yang dapat diambil dari kunjungan ke Direktorat Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Luar Negeri adalah kerjasama ekonomi dan perdagangan berpotensi untuk ditingkatkan dalam konteks diversifikasi pasar ekspor dan impor kedua negara serta *South-South Trade* di antara *emerging economies*. Dalam kaitan impor, diharapkan dapat diperoleh produk-produk yang murah dan berkualitas baik.

Kementerian Pembangunan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan. Brazil dalam pemerintahan Presiden Lula telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dari 30 juta menjadi 16,2 juta. Keberhasilan program-program untuk rakyat di Brazil ditentukan oleh komitmen pemerintah yang kuat untuk memberantas kemiskinan di masyarakat yang pada saat ini masih tersisa 16,2 juta rakyat yang berada dalam kondisi sangat miskin/*extreme poverty*. Komitmen ini ditunjukkan dengan antara lain:

- adanya sistem pendataan tunggal bagi penduduk miskin (*unified registry*) dengan teknologi unggul.
- terus menyiapkan sumber daya tertentu untuk menjangkau pendataan rakyat miskin di seluruh pelosok Brazil (*active search*).
- memiliki kejelasan struktur manajemen dalam proses pengambilan keputusan
- transparansi dalam mempublikasikan hasil pendataan penduduk miskin pada *level municipality*, akses publik terhadap daftar hasil pendataan tersebut;
- model program yang inovatif dan terintegrasi (seperti *Bolsa Familia*, *Zero Hunger Program*, *Community Kitchen*, serta pendanaan yang cukup bagi penerima yang mencapai maksimal USD 340/bulan.
- partisipasi bank-bank nasional yang mampu menjangkau seluruh penduduk di wilayah Brazil khususnya di daerah yang terisolir untuk memberikan akses langsung bantuan keuangan bagi penerima.

c. USAID Brazil

- Brazil telah menjadi salah satu *emerging economy* dan untuk mempertahankan eksistensi USAID di Brazil, sehingga Pemerintah Amerika Serikat merevisi kebijakannya dengan Brazil menjadi kerjasama yang bersifat *partnership*. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID dan Pemerintah Brazil melalui ABC melakukan kerjasama triangular untuk membantu Mozambique dalam bidang *Food Security*, *School feeding* dan *HIV/Aids*. Komposisi pembiayaan program tersebut adalah 70% ditanggung oleh USA dan 30 % ditanggung oleh ABC.
- Pelajaran yang dapat diambil dari kunjungan ke USAID Brazil adalah mendorong inisiasi kerjasama dengan USAID melalui skema trilateral dengan pola pendanaan *co-sharing*.

d. Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial (IPEA)

- *IPEA* merupakan institusi pemerintah yang berada di bawah Sekretariat Khusus urusan Isu-isu Strategis yang secara struktural berada di bawah Kepresidenan Brazil sejak 10 tahun yang lalu.
- Didirikan 47 tahun yang lalu untuk merespon kebutuhan analisis kebijakan yang sangat penting bagi penyusunan rencana pembangunan Brazil. Sebelumnya *IPEA* menjadi bagian dari Kementerian Perencanaan.
- Tugas *IPEA*: melakukan dialog/diskusi kebijakan (*policy dialogue*) dan melakukan riset dan analisis kebijakan terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- Institusi ini memiliki kurang lebih 2000 orang peneliti.
- Ruang lingkup riset sosial ekonomi bervariasi mulai dari hubungan internasional, politik, makroekonomi, studi sosial, dan studi-studi lain yang sifatnya sektoral yang terkait dengan produktivitas.
- Saat ini *IPEA* telah dan sedang melakukan kerjasama dalam riset dengan berbagai lembaga riset dari negara lain di berbagai kawasan termasuk Asia.
- Sumber pendanaan *IPEA* seluruhnya berasal dari anggaran pembangunan Brazil. *IPEA* memberikan pelayanan riset dan fasilitasi dialog untuk membahas isu-isu strategis yang diminta oleh kementerian/lembaga pemerintah Brazil.
- *IPEA* memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan Brazil karena hasil riset yang dilakukannya telah memberikan masukan strategis bagi para pengambil keputusan di pemerintahan Brazil.
- Pelajaran yang dapat diambil dari kunjungan ke *IPEA* adalah *IPEA* membuka peluang bagi adanya program penelitian bersama dan *capacity building*, sehingga perlu dijajagi kemungkinan kerjasama yang lebih konkrit antara lembaga penelitian Indonesia dan *IPEA* serta pemanfaatan fasilitas training yang tersedia. Indonesia dapat mempelajari *institutional arrangement* dari *IPEA* bagi restrukturisasi lembaga riset dan pengembangan yang ada di Indonesia.

e. Pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan *Embrapa* (lembaga riset dan pusat pelatihan di bidang pertanian)

- *Embrapa* berdiri pada tahun 1973, merupakan lembaga riset dan kerjasama di bidang pertanian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pertanian Brazil dengan status sebagai perusahaan yang sebagian besar dibiayai dengan anggaran pemerintah (kurang lebih US\$ 1 milyar per tahun).
- Misi *Embrapa*: sebagai lembaga penyedia solusi bagi pengembangan agrobisnis di Brazil melalui penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Brazil berhasil meningkatkan produksi berbagai komoditi pertanian menjadi sangat tinggi, dari negara pengimpor menjadi negara produsen dan pengeksport tebu, kopi, kedelai, tembakau, dan sebagainya. Peningkatan produksi terutama diperoleh sebagai akibat perluasan lahan, konsentrasi areal produksi, jaminan harga, akses kredit, penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan, serta peningkatan produktivitas lahan.
- Dengan dukungan *Embrapa*, produktivitas pertanian meningkat pesat. Beberapa komoditi yang sebelumnya tidak ditanam di Brazil, telah berhasil dikembangkan dengan pesat.
- Hal lain yang mendukung keberhasilan *Embrapa* antara lain karena adanya komitmen pemerintah yang kuat untuk mendukung *research and development* di sektor pertanian

- Embrapa memiliki proyek-proyek kerjasama internasional untuk menyempurnakan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan untuk kemudian berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara lain.
 - Dalam konteks kerjasama bilateral, Indonesia telah menyampaikan kemungkinan untuk kerjasama di bidang ristik untuk kedelai dan ethanol. Di sisi lain Brazil mengusulkan kerjasama penelitian di bidang kelapa sawit. Dalam kaitan ini masih belum terdapat kesamaan pandangan untuk bekerjasama di ketiga komoditi tersebut.
 - Di masa mendatang terdapat beberapa peluang kerjasama teknik antara Indonesia – Brazil di bidang pertanian dan agribisnis. Dalam hal ini kiranya pihak-pihak terkait di Indonesia dapat mengkaji lebih lanjut mengenai peluang kerjasama dimaksud.
- f. *JICA Brazil*
- Potensi keberhasilan *Triangular Cooperation* KSS akan ditentukan oleh komitmen negara-negara untuk melaksanakan programnya. Program *Pro Savannah* kerjasama JICA, Brazil dan Mozambique diawali dengan komitmen Pimpinan Tinggi negara dua negara Jepang dan Brazil, dan kemudian pimpinan tertinggi Mozambique yang dikomunikasikan langsung oleh Presiden Brazil. Atas dasar komitmen ketiga pimpinan negara, maka program tersebut dimulai. Keberhasilan lainnya adalah manajemen pengelolaan program KSS *Triangular Cooperation* yang dapat mengakomodasi persoalan koordinasi dan komunikasi, baik itu internal dalam negeri masing-masing maupun koordinasi tiga negara. Hal lain, mekanisme kerjasama yang dirumuskan secara jelas dan tegas yang antara lain ditujukan pula untuk menghindari *transactions cost* yang berdampak negatif.
- g. Selain pertemuan tersebut di atas Tim juga melakukan pertemuan lainnya sebagai berikut:
- Tim juga melakukan *courtesy call* ke Kementerian Hubungan Luar Negeri Brazil (*Ministry of External Relation*) yang diterima oleh *Under Secretary General for Political Affairs II, Ambassador Maria Edileuza Fontenele Reis*.
 - Dalam hal berbagi pengalaman dari keberhasilan Brazil *Under Secretary General* siap untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kerjasama selatan-selatan. Brazil telah meletakkan pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dalam kerangka pemberantasan kemiskinan dan pembangunan sosial.
 - Tantangan utama adalah membangun paradigma baru yang mengedepankan masalah kemiskinan dan pembangunan sosial. Pemberantasan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan penghormatan HAM dan perdamaian dunia. Brazil menyambut baik usulan Indonesia untuk tetap menjaga dan melaksanakan Agenda pembangunan yang menjadi komitmen G20.
 - Terkait dengan peluang Indonesia untuk bergabung dalam *BRICS*, *Ambassador Maria* menyampaikan bahwa forum *BRICS* masih bersifat informal dan belum ada kesepakatan yang mengikat. Anggota *BRICS* sedang mencari arah dan format kerjasama *BRICS* ke depan. Kemlu berpandangan bahwa kemungkinan kerja sama dengan Indonesia secara bilateral akan lebih efektif dibandingkan kerja sama dalam kerangka *BRICS* dan *IBSA*. Bahkan *Ambassador Maria* mengusulkan kerja sama teknik dua negara dalam membantu negara berkembang lainnya seperti Myanmar tanpa adanya faktor kondisionalitas.

- Terkait dengan *IBSA*, Brazil bersama India dan Afrika Selatan tahun 2003 mendirikan *IBSA* sebagai wadah kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan di negara berkembang. Disampaikan bahwa forum *IBSA* sudah lebih terkonsolidasi. Setiap tahun tiga negara tersebut menyeter 1 juta USD untuk program pemberantasan kemiskinan dan di negara berkembang antara lain di Guinea Bissau, Timor Leste, Kamboja, Nepal, Viet Nam, dll.
- Brazil menyampaikan bahwa dialog kerja sama kedua belah pihak yang lebih konkrit khususnya Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan kiranya dapat ditindaklanjuti pada kesempatan kunjungan Menlu Brazil Antonio Patriota ke Bali, bulan November 2011 dalam rangka penandatanganan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* di sela-sela *the 19th ASEAN Summit and related Summits*. Penandatanganan *TAC* oleh Brazil memperlihatkan keinginan Pemerintah Brazil untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan ASEAN.

V. KESIMPULAN

- Rencana Induk KSS Indonesia bertujuan untuk meletakkan landasan bagi penguatan dan peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan yang lebih maju dan terintegrasi sesuai dengan dinamika konstelasi global untuk mendukung pemenuhan kepentingan dan pembangunan nasional. Rencana Induk KSS Indonesia akan menjadi acuan bagi penyusunan peta jalan KSS Indonesia selama periode 2011-2025 secara lebih komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui Rencana Induk ini diharapkan peningkatan peran Indonesia di arena internasional dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan bagi pertukaran pengalaman dalam kegiatan KSS.
- Pelaksanaan Rencana Induk KSS Indonesia membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan agar dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dinamis, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan KSS.
- Rencana Induk KSS Indonesia adalah *living document* yang pelaksanaannya akan di review setiap lima tahun sesuai dengan mekanisme review yang tertuang dalam dokumen ini. Hasil review akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Induk KSS lebih lanjut.
- Indonesia perlu mempelajari pengalaman Brazil dalam pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, antara lain :
 - Komitmen politik yang kuat dari pemerintah secara berkelanjutan,
 - Program yang terfokus dengan target yang jelas,
 - Koordinasi yang kuat antara lembaga terkait,
 - Dukungan sistem pendataan tunggal (*single registry*) yang rapi,
 - Sistem *monitoring* dan evaluasi yang kontinyu, oleh karenanya disarankan agar TNP2K dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Pemberantasan Kelaparan.